



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PARIWISATA

JALAN DEWI SARTIKA NO. 45 PALU, KODE POS 94121

TELP. (0451) 483942, FAX (0451) 483941

Email : sulteng.pariwisata@gmail.com Website : pariwsata.sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.7.2.6/299/Dispar**

TENTANG

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, maka perlu disusun Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata.
10. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 100.2.1/125.1/Bappeda-G.ST/2023 tentang Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**
- PERTAMA : Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, meliputi Tabel Definisi Operasional Indikator Utama, Tabel Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- KETIGA : Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palu
Pada tanggal : 05 Februari 2026



KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

**Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formula / Metode Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data & Frekuensi	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Daya Dukung Usaha Jasa Pariwisata Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persentase kontribusi atau pangsa nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha penyedia akomodasi (hotel, losmen, penginapan) serta penyedia jasa makan dan minum (restoran, rumah makan, kafe) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu satu tahun. Indikator makro ekonomi ini digunakan sebagai proksi utama untuk mengukur besaran dampak sektor kepariwisataan daerah.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%) = $\frac{\text{Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum} / \text{Total PDRB Daerah}}{\times 100\%}$	Peningkatan nilai rasio menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata berbasis akomodasi dan kuliner berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang semakin dominan dalam struktur perekonomian daerah.	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Frekuensi: Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf
2	Meningkatnya Daya Saing dan Perluasan Jaringan Pemasaran Destinasi Pariwisata Unggulan	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	Kuantitas fisik (orang) warga negara asing yang datang berkunjung ke destinasi pariwisata daerah di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode tahun anggaran.	Jumlah Tamu Wisman = Σ (Tamu Wisman yang berkunjung di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah yang menggunakan Hotel Berbintang dan Tidak Berbintang)	Semakin tinggi jumlah wisman, menunjukkan efektivitas strategi promosi luar negeri serta mengindikasikan penguatan daya saing destinasi pariwisata Sulawesi Tengah di pasar internasional.	Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Frekuensi: Bulanan / Tahunan	Bidang Pemasaran Pariwisata
3	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing Berbasis Kekayaan Intelektual	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB (%)	Persentase bagian atau nilai pangsa pasar (share) yang berkontribusi oleh akumulasi 17 subsektor ekonomi kreatif (seperti kuliner, kriya, fesyen, aplikasi, dsb.) terhadap total nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode akuntansi. PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB yang berkontribusi oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen, 2. Kuliner, 3. Kriya, 4. Film, Animasi dan Video, 5. Pengembangan Permainan, 6. Aplikasi, 7. Musik, 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi, 10. Desain Komunikasi Visual, 11. Televisi dan Radio, 12. Seni Rupa, 13. Desain Produk, 14. Periklanan, 15. Penerbitan, 16. Arsitektur, 17. Desain Interior	Proporsi PDRB Ekraf (%) = $\frac{(\Sigma \text{Nilai Tambah Bruto 17 Subsektor Ekonomi Kreatif} / \text{Total PDRB ADHB Daerah}) \times 100\%}{}$	Semakin besar nilai proporsi ekonomi kreatif, menunjukkan terjadinya akselerasi hilirisasi produk lokal, peningkatan keinovatifan masyarakat, dan pergeseran ke arah struktur ekonomi kreatif berbasis pengetahuan.	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah & diolah dengan Kajian Disagregasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Frekuensi: Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Mengetahui
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah,

Dra. DIAH AGUSTINGINGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19640826 199412 2 006



Definisi Operasional Indikator Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Definisi	Formula/Metode Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekwensi	Penanggung Jawab	Crosscutting Terhadap Program	Persentase CSF
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Hari)	Jangka waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang wisatawan mancanegara saat tinggal atau menginap di fasilitas akomodasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode waktu.	Rata-rata Lama Kunjungan = (Jumlah Malam Tempat Tidur yang Terpakai oleh Wisman) / (Jumlah Wisman yang Datang Menginap)	Semakin tinggi angka rata-rata hari, menandakan destinasi wisata di Sulawesi Tengah memiliki daya tarik (holding power) yang baik untuk menahan wisatawan tinggal lebih lama, meningkatkan	BPS (Sulteng Dalam Angka) & Survei Khusus Akomodasi	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara (\$)	Jumlah uang yang dibelanjakan secara rata-rata oleh satu orang wisatawan mancanegara per kunjungan selama berada di wilayah Sulawesi Tengah, mencakup akomodasi, makan-minum, transportasi lokal, cenderamata, dan tiket masuk	Rata-rata Pengeluaran = Total Estimasi Pengeluaran Seluruh Wisman Ter-survei / Jumlah Sampel Wisman yang Disurvei	Nilai pengeluaran yang meningkat menunjukkan peningkatan kualitas kunjungan (quality tourism) dan tingginya pengeluaran wisatawan untuk produk ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.	Dinas Pariwisata (Survei Passenger Exit Survey) & BI / BPS	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Lokasi)	Jumlah lokasi objek wisata komersial yang dikembangkan, dipelihara sarana prasarananya, dipantau kualitas pengelolaannya, atau diperkuat kapasitas sdm pengelolanya.	Jumlah Lokasi daya tarik wisata unggulan/laporan monitoring/pengelola pariwisata yang difasilitasi oleh bidang pengembangan destinasi.	Meningkatnya objek wisata yang dikelola dengan baik meningkatkan daya tarik kunjungan dan perputaran ekonomi ekonomi pariwisata daerah.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (Lokasi)	Jumlah lokasi objek wisata komersial yang dikembangkan, dipelihara sarana prasarananya, dipantau kualitas pengelolaannya, atau diperkuat kapasitas sdm pengelolanya.	Jumlah Lokasi daya tarik wisata unggulan/laporan monitoring/pengelola pariwisata yang difasilitasi oleh bidang pengembangan destinasi.	Meningkatnya objek wisata yang dikelola dengan baik meningkatkan daya tarik kunjungan dan perputaran ekonomi ekonomi pariwisata daerah.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	Jumlah lokasi objek wisata komersial yang dikembangkan, dipelihara sarana prasarananya, dipantau kualitas pengelolaannya, atau diperkuat kapasitas sdm pengelolanya.	Jumlah Lokasi daya tarik wisata unggulan/laporan monitoring/pengelola pariwisata yang difasilitasi oleh bidang pengembangan destinasi.	Meningkatnya objek wisata yang dikelola dengan baik meningkatkan daya tarik kunjungan dan perputaran ekonomi ekonomi pariwisata daerah.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi (Dokumen)	Jumlah lokasi objek wisata komersial yang dikembangkan, dipelihara sarana prasarananya, dipantau kualitas pengelolaannya, atau diperkuat kapasitas sdm pengelolanya.	Jumlah Lokasi daya tarik wisata unggulan/laporan monitoring/pengelola pariwisata yang difasilitasi oleh bidang pengembangan destinasi.	Meningkatnya objek wisata yang dikelola dengan baik meningkatkan daya tarik kunjungan dan perputaran ekonomi ekonomi pariwisata daerah.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Jumlah lokasi objek wisata komersial yang dikembangkan, dipelihara sarana prasarananya, dipantau kualitas pengelolaannya, atau diperkuat kapasitas sdm pengelolanya.	Jumlah Lokasi daya tarik wisata unggulan/laporan monitoring/pengelola pariwisata yang difasilitasi oleh bidang pengembangan destinasi.	Meningkatnya objek wisata yang dikelola dengan baik meningkatkan daya tarik kunjungan dan perputaran ekonomi ekonomi pariwisata daerah.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	Dokumen perencanaan, penetapan, laporan movev, serta penyediaan fasilitas fisik di area Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).	Jumlah Dokumen perencanaan/penetapan/sarana fisik KSPP yang disahkan atau dipelihara.	Penguatan KSPP menegaskan fokus prioritas pembangunan kepariwisataan daerah pada zona potensial berdampak ekonomi luas.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Laporan)	Dokumen perencanaan, penetapan, laporan movev, serta penyediaan fasilitas fisik di area Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).	Jumlah Dokumen perencanaan/penetapan/sarana fisik KSPP yang disahkan atau dipelihara.	Penguatan KSPP menegaskan fokus prioritas pembangunan kepariwisataan daerah pada zona potensial berdampak ekonomi luas.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Unit)	Dokumen perencanaan, penetapan, laporan movev, serta penyediaan fasilitas fisik di area Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).	Jumlah Dokumen perencanaan/penetapan/sarana fisik KSPP yang disahkan atau dipelihara.	Penguatan KSPP menegaskan fokus prioritas pembangunan kepariwisataan daerah pada zona potensial berdampak ekonomi luas.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	Dokumen perencanaan, penetapan, laporan movev, serta penyediaan fasilitas fisik di area Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).	Jumlah Dokumen perencanaan/penetapan/sarana fisik KSPP yang disahkan atau dipelihara.	Penguatan KSPP menegaskan fokus prioritas pembangunan kepariwisataan daerah pada zona potensial berdampak ekonomi luas.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	Instrumen output/outcome yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran target program kerja dinas pariwisata daerah.	Jumlah Satuan output yang berhasil dicapai sesuai target rencana kerja operasional tahunan.	Tercapainya angka target menandakan realisasi fisik program dinas berjalan optimal sesuai koridor penganggaran.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Definisi	Formula/Metode Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekwensi	Penanggung Jawab	Crosscutting Terhadap Program	Persentase CSF
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapan (Lokasi)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi (Dokumen)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah dokumen data dukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Dokumen)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Kegiatan)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Laporan)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Lokasi)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi (Dokumen)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Dokumen)	Dokumen makro pengembangan destinasi pariwisata (termasuk MICE), data dukung IPKN, jejaring tata kelola, atau lokasi bersertifikat pariwisata berkelanjutan.	Jumlah Dokumen rencana/destinasi yang ditetapkan/kegiatan jejaring pariwisata yang terlaksana.	Dokumen dan tata kelola destinasi yang komprehensif menguatkan pilar daya saing pariwisata provinsi di kancah nasional.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Ditetapkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)	Instrumen output/outcome yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran target program kerja dinas pariwisata daerah.	Jumlah Satuan output yang berhasil dicapai sesuai target rencana kerja operasional tahunan.	Tercapainya angka target menandakan realisasi fisik program dinas berjalan optimal sesuai koridor penganggaran.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata		
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (ribu orang)	Total kuantitas warga negara asing yang berkunjung ke objek wisata dan/atau tercatat menginap pada akomodasi hotel (bintang maupun non-bintang) di wilayah Sulawesi Tengah.	Total Wisman = Jumlah Wisman Menginap di Hotel Bintang + Non-Bintang (diakumulasikan dan disajikan dalam satuan ribu)	Pertumbuhan angka mencerminkan efektivitas strategi promosi, pemasaran, penjenamaan (branding), dan daya saing pariwisata Sulawesi Tengah di pasar internasional.	BPS (Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel) & Laporan Bulanan Industri Akomodasi	Bulanan / Tahunan	Bidang Pemasaran Pariwisata		
		Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (juta orang)	Frekuensi mobilisasi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan antar-kabupaten/kota di dalam wilayah Sulawesi Tengah atau dari luar provinsi masuk ke Sulawesi Tengah dengan durasi kurang dari 6	Total Pergerakan Wisnus = Akumulasi pergerakan wisatawan nusantara menggunakan metode Positioning Mobile Data (PMD)	Pertumbuhan pergerakan menunjukkan geliat aktivitas pariwisata domestik, efektivitas kalender kegiatan (Event Calendar) daerah, serta pergerakan ekonomi antar-wilayah.	Kemenparekraf (Data PMD) & Dinas Pariwisata Provinsi	Tahunan	Bidang Pemasaran Pariwisata		
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terpromosinya Produk Pariwisata Unggulan ke Mancanegara	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	Aktivitas promosi pariwisata daerah melalui ragam media cetak, media digital, pameran industri, baik di skala domestik (dalam negeri) maupun internasional (luar negeri).	Jumlah Kegiatan pemasaran/dokumen promosi/laporan movev pemasaran pariwisata yang diselenggarakan.	Efektivitas pemasaran berbanding lurus dengan peningkatan brand awareness destinasi daerah serta volume kunjungan wisatawan.	Bidang Pemasaran Pariwisata	Tahunan	Bidang Pemasaran Pariwisata		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Definisi	Formula/Metode Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekwensi	Penanggung Jawab	Crosscutting Terhadap Program	Persentase CSF
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	Aktivitas promosi pariwisata daerah melalui ragam media cetak, media digital, pameran industri, baik di skala domestik (dalam negeri) maupun internasional (luar negeri).	Jumlah Kegiatan pemasaran/dokumen promosi/laporan movev pemasaran pariwisata yang diselenggarakan.	Efektivitas pemasaran berbanding lurus dengan peningkatan brand awareness destinasi daerah serta volume kunjungan wisatawan.	Bidang Pemasaran Pariwisata	Tahunan	Bidang Pemasaran Pariwisata		
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya (Dokumen)	Aktivitas promosi pariwisata daerah melalui ragam media cetak, media digital, pameran industri, baik di skala domestik (dalam negeri) maupun internasional (luar negeri).	Jumlah Kegiatan pemasaran/dokumen promosi/laporan movev pemasaran pariwisata yang diselenggarakan.	Efektivitas pemasaran berbanding lurus dengan peningkatan brand awareness destinasi daerah serta volume kunjungan wisatawan.	Bidang Pemasaran Pariwisata	Tahunan	Bidang Pemasaran Pariwisata		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap ADHB	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	Nilai output bruto dari 17 subsektor ekonomi kreatif dikurangi biaya antara atas barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi di Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku (ADHB).	Nilai Tambah Ekraf = Total Nilai Output Bruto 17 Subsektor Ekraf - Total Biaya Antara	Semakin besar nilai tambah ekonomi kreatif, semakin tinggi kontribusi sektor industri kreatif dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi total daerah dan mendorong kemandirian pelaku usaha	BPS Provinsi Sulawesi Tengah (Disagregasi Tabel PDRB Lapangan Usaha)	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi (Laporan)	Instrumen output/outcome yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran target program kerja dinas pariwisata daerah.	Jumlah Satuan output yang berhasil dicapai sesuai target rencana kerja operasional tahunan.	Tercapainya angka target menandakan realisasi fisik program dinas berjalan optimal sesuai koridor penganggaran.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah dokumen promosi dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif (Dokumen)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula (Laporan)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pelaku Ekraf yang Berdaya Saing	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	Instrumen output/outcome yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran target program kerja dinas pariwisata daerah.	Jumlah Satuan output yang berhasil dicapai sesuai target rencana kerja operasional tahunan.	Tercapainya angka target menandakan realisasi fisik program dinas berjalan optimal sesuai koridor penganggaran.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	Instrumen output/outcome yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran target program kerja dinas pariwisata daerah.	Jumlah Satuan output yang berhasil dicapai sesuai target rencana kerja operasional tahunan.	Tercapainya angka target menandakan realisasi fisik program dinas berjalan optimal sesuai koridor penganggaran.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	Instrumen output/outcome yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran target program kerja dinas pariwisata daerah.	Jumlah Satuan output yang berhasil dicapai sesuai target rencana kerja operasional tahunan.	Tercapainya angka target menandakan realisasi fisik program dinas berjalan optimal sesuai koridor penganggaran.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	Jumlah tenaga Kerja Pariwisata (orang)	Jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang terserap dan bekerja secara penuh maupun paruh waktu pada sektor formal dan informal industri pariwisata (akomodasi, biro perjalanan, pemandu wisata, dsb.).	Total Tenaga Kerja Pariwisata = Penjumlahan total pekerja sektor pariwisata yang terdata pada Sakernas Kategori Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum.	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja mengindikasikan bahwa sektor pariwisata mampu menjadi salah satu pilar utama penyerapan tenaga kerja daerah dan menekan angka pengangguran.	BPS (Sakernas) & Dinas Tenaga Kerja / Dinas Pariwisata	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Definisi	Formula/Metode Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekwensi	Penanggung Jawab	Crosscutting Terhadap Program	Persentase CSF
		Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (orang)	Jumlah individu yang bekerja dan menggantikan sumber pendapatannya pada 17 subsektor industri kreatif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.	Total Tenaga Kerja Ekraf = Akumulasi data tenaga kerja hasil pemetaan/pendaftaran pelaku usaha kreatif aktif se-Sulawesi Tengah.	Angka ini menggambarkan kapasitas ekosistem ekonomi kreatif dalam menciptakan lapangan kerja berbasis keahlian, bakat, dan kreativitas personal.	Database Terpadu Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata) & Survei Angkatan Kerja Nasional BPS	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf		
		Jumlah Tenaga kerja/pelau usaha pariwisata yang tersertifikasin (orang)	Akumulasi tenaga kerja sektor pariwisata di Sulawesi Tengah yang telah memiliki sertifikat kompetensi resmi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga sertifikasi profesi resmi lainnya.	Total Tersertifikasi Pariwisata = Akumulasi Tenaga Kerja Pariwisata yang Lulus Uji Kompetensi hingga Tahun t.	Peningkatan jumlah menunjukkan standarisasi kualitas pelayanan pariwisata daerah yang semakin berdaya saing internasional dan profesional.	Bidang Kelembagaan/SDP Dinas Pariwisata, LSP Kepariwisataan, & BNSP	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf		
		Jumlah Tenaga kerja/pelau usaha Ekonomi Kreatif yang tersertifikasin (orang)	Akumulasi para pelaku atau tenaga kerja ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah yang memegang sertifikasi kompetensi keahlian profesi spesifik sesuai subsektor ekraf yang ditekuni.	Total Tersertifikasi Ekraf = Akumulasi Pelaku Ekraf yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi Terverifikasi hingga Tahun t.	Menunjukkan bahwa produk dan layanan ekonomi kreatif daerah dihasilkan oleh tenaga ahli yang kompeten, kompetitif, dan memiliki legalitas keahlian yang kuat.	Bidang Kelembagaan/SDP Dinas Pariwisata & Lembaga Sertifikasi Kompetensi terkait	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf		
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Tersertifikasinya Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi (Orang)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata (Laporan)	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata, pelatihan asesor kompetensi pariwisata/ekraf (WPA dan RCC), sertifikasi kompetensi SDM sesuai SKKNI.	Jumlah Orang/pelaku pariwisata yang mengikuti pemberdayaan/pelatihan asesor/disertifikasi.	Meningkatnya sdm pariwisata yang tersertifikasi menjamin standarisasi mutu layanan pariwisata daerah berkelas internasional.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata, pelatihan asesor kompetensi pariwisata/ekraf (WPA dan RCC), sertifikasi kompetensi SDM sesuai SKKNI.	Jumlah Orang/pelaku pariwisata yang mengikuti pemberdayaan/pelatihan asesor/disertifikasi.	Meningkatnya sdm pariwisata yang tersertifikasi menjamin standarisasi mutu layanan pariwisata daerah berkelas internasional.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) (Orang)	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata, pelatihan asesor kompetensi pariwisata/ekraf (WPA dan RCC), sertifikasi kompetensi SDM sesuai SKKNI.	Jumlah Orang/pelaku pariwisata yang mengikuti pemberdayaan/pelatihan asesor/disertifikasi.	Meningkatnya sdm pariwisata yang tersertifikasi menjamin standarisasi mutu layanan pariwisata daerah berkelas internasional.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata, pelatihan asesor kompetensi pariwisata/ekraf (WPA dan RCC), sertifikasi kompetensi SDM sesuai SKKNI.	Jumlah Orang/pelaku pariwisata yang mengikuti pemberdayaan/pelatihan asesor/disertifikasi.	Meningkatnya sdm pariwisata yang tersertifikasi menjamin standarisasi mutu layanan pariwisata daerah berkelas internasional.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) (Orang)	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata, pelatihan asesor kompetensi pariwisata/ekraf (WPA dan RCC), sertifikasi kompetensi SDM sesuai SKKNI.	Jumlah Orang/pelaku pariwisata yang mengikuti pemberdayaan/pelatihan asesor/disertifikasi.	Meningkatnya sdm pariwisata yang tersertifikasi menjamin standarisasi mutu layanan pariwisata daerah berkelas internasional.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah produk kreatif (Produk)	Instrumen output/outcome yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran target program kerja dinas pariwisata daerah.	Jumlah Satuan output yang berhasil dicapai sesuai target rencana kerja operasional tahunan.	Tercapainya angka target menandakan realisasi fisik program dinas berjalan optimal sesuai koridor penganggaran.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlatihnya Pelaku Pariwisata dan Eknomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Definisi	Formula/Metode Perhitungan	Interpretasi	Sumber Data	Frekwensi	Penanggung Jawab	Crosscutting Terhadap Program	Persentase CSF
		Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya (Lembaga)	Fasilitasi rantai produksi ekraf, penyediaan ruang kreasi jaringan kreatif, rencana aksi ekraf, penguatan asosiasi, pendirian LSP ekraf, hingga penciptaan produk kreatif baru.	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi/dokumen rencana aksi/produk ekraf yang dihasilkan dan didukung.	Maju dan tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif memperluas lapangan usaha berbasis keinovatifan lokal masyarakat.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahunan	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		



Mengetahui

Kepala Dinas Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah,

Dra. DIAH AGUSTINGINGSIH, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19630826 199412 2 006